

**SKRIPSI**

**JARINGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ECOTOURISM KAWASAN  
KARST RAMMANG-RAMMANG DI KABUPATEN MAROS**

**A. FAUZAN SABIR SIRADJ MUNIR A**

**E011201060**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**

**THESIS**

**POLICY NETWORK FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT OF RAMMANG-  
RAMMANG KARST AREA IN MAROS DISTRICT**

**A. FAUZAN SABIR SIRADJ MUNIR A**

**E011201060**



**PUBLIC ADMINISTRATION STUDY PROGRAM  
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE  
FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE  
HASANUDDIN UNIVERSITY**

**2024**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : A. Fauzan Sabir Siradj Munir A

NIM : E011201060

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Jaringan Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi. Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 8 Agustus 2024

Menyetujui

Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Alwi, M.Si  
NIP.196310151989031006

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik,



Prof. Dr. Alwi, M.Si  
NIP.196310151989031006

**JARINGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ECOTOURISM KAWASAN  
KARST RAMMANG-RAMMANG DI KABUPATEN MAROS**

**A. FAUZAN SABIR SIRADJ MUNIR A  
E011201060**

Skripsi

Telah dipertahankan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik pada tanggal 19 Agustus  
2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan  
pada

Program Studi Administrasi Publik  
Departemen Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Makassar

Menyetujui  
Pembimbing Tugas Akhir



Prof. Dr. Alwi, M.Si  
NIP.196310151989031006

Mengetahui  
Ketua Program Studi Administrasi Publik,



Prof. Dr. Alwi, M.Si  
NIP.196310151989031006

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “Jaringan Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Alwi, M.Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 Agustus 2024



A. Fauzan Sabir Siradi Munir A  
E011201060

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan lancar dan skripsi ini dapat dirampungkan atas nikmat, ridho serta kehendak Allah SWT dan atas bimbingan, diskusi serta arahan **Prof. Dr. Alwi, M.Si** sebagai pembimbing, **Dr. Gita Susanti, M.Si** sebagai penguji 1 dan **Dr. Ishak Salim, M.A.** sebagai penguji 2. Terima kasih yang tak hingga saya haturkan kepada mereka yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Penghargaan tinggi saya sampaikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kab. Maros dalam hal ini Bidang Pariwisata Disparpora, Wakil Ketua Pansus Ranperda No 3 Tahun 2019, Pemerintah Desa Salenrang beserta BUMDES Appakabaji, BP Geopark Maros-Pangkep, POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang, Komunitas Anak Sungai, Mongabay.id, serta Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas kesempatan mengambil data untuk memperkaya hasil penelitian saya.

Kepada Badan Amil Zakat Nasional, saya mengucapkan terima kasih atas Beasiswa Cendekia Baznas selama menempuh program pendidikan sarjana. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pimpinan Universitas Hasanuddin, Dekan serta Wakil Dekan FISIP UNHAS; dan seluruh Dosen di Departemen Ilmu Administrasi Publik serta tenaga pendidik yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana dan rekan-rekan dalam tim penelitian.

Kepada kedua orang tua yang menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan studi, Bapak A. Amry Mattalitti dan Ibu Hastuty Mano yang keduanya dengan segenap jiwa serta raga memperjuangkan saya dalam menyelesaikan studi. Tak terhingga oleh kata cinta kasih itu, munajat di tiap sembah sujud akan menjadi persaksian bahwa surga dunia adalah kehadirannya. Tak lupa apresiasi yang besar saya sampaikan kepada saudara terkasih, Andi Faiz, Andi Fika dan Andi Farah atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai.

Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menaruh empati serta motivasi dalam setiap langkah kebaikan (Audi, Ahmad, Adi, Ade, Fariq, Rifqi), dan juga kepada (Ainun, Rifki, Rafli, Paje) serta kedua mentor saya selama di kampus (Kak Rizal dan Kak Adnan), yang sudah menjadi kawan berprogresif, bertukar pemikiran, ada di saat-saat saya susah dan duka serta banyak manfaat selama berproses saat menyandang status mahasiswa yang sebentar lagi saya akhiri melalui proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih untuk banyak wadah belajar (Teman Kerja FISIP UH, HUMANIS FISIP UH, SV PKKMB UH 2024, IMM KORKOM UNHAS, Kampus Gagasan, PENA 20) atas segala kesempatan yang menjadi wadah pengembangan bagi saya. Terima kasih untuk CSR Departement SCM dan Samudera Indonesia Makassar telah menerima saya dan banyak memberi input berharga untuk karir saya kedepan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pendidik di FISIP UNHAS (Pak Jaya, Bu Ija, Pak Lili, Pak Andi Revi) dan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin.

Kepada seseorang yang telah hadir dan yang hadir namun tak lagi kebersamai, terima kasih telah menjadi bagian dari proses penyempurnaan diri penulis yang telah memberi semangat, kebaikan, cinta kasih serta kesempatan. Serta semua pihak terlibat dan berkontribusi yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Dan tentu saja apresiasi setinggi-tingginya kepada diri sendiri.

*“Hal Jazaa ul Ihsan illal Ihsan,” – 55:60.*

Penulis  
A. Fauzan Sabir Siradj Munir A

## ABSTRAK

### A. Fauzan Sabir Siradj Munir A. **Jaringan Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros**

(Dibimbing oleh Prof. Dr. Alwi, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana jaringan kebijakan pengembangan ecotourism kawasan karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Adapun sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan Dimensi Jaringan Kebijakan Van Waarden (1992) yang terdiri dari 7 (tujuh) dimensi, yaitu Aktor (Actors), Fungsi (Function), Struktur (Structure), Pelembagaan (Institutionalisation), Aturan Main (Rule of Conduct), Hubungan Kekuasaan (Power Relation), dan Strategi Aktor (Actor Strategies). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) aktor yang terlibat dalam jumlah telah seimbang walau keterlibatannya masih belum optimal. (2) Fungsi jaringan kebijakan menunjukkan aktor memiliki peran masing-masing walau perlu pengoptimalan lebih lanjut. (3) Struktur jaringan tidak diartikan sebagai alur kerja dan mekanisme kerja belum jelas. (4) Pelembagaan pada jaringan tidak berjalan dengan optimal. (5) pola interaksi atau aturan main dalam jaringan bersifat konsultatif. (6) Distribusi kekuasaan masih bersifat sentralistik karena belum ada aturan yang jelas terkait distribusi yang harus dilakukan oleh aktor terkait. (7) Strategi yang dilakukan aktor telah optimal.

**Kata Kunci:** Jaringan Kebijakan, Pengembangan Ecotourism, Aktor, Rammang-Rammang.

## ABSTRACT

A. Fauzan Sabir Siradj Munir A. **Policy Network for Ecotourism Development of Rammang-Rammang Karst Area in Maros District**  
(Supervised by Prof. Dr. Alwi, M.Si)

*This research aims to describe and analyze how the policy network for developing ecotourism in the Rammang-Rammang karst area in Maros Regency. This research method uses a qualitative approach with a case study research design. The data sources were obtained through observation, interviews and documentation. This research was analyzed using Van Waarden's Policy Network Dimension (1992) which consists of 7 (seven) dimensions, namely Actors, Function, Structure, Institutionalization, Rules of Conduct, Power Relations, and Actor Strategies. The results of this study indicate that (1) the actors involved in the number have been balanced even though their involvement is still not optimal. (2) The function of the policy network shows that actors have their respective roles even though further optimization is needed. (3) The network structure is not interpreted as a workflow and the work mechanism is not yet clear. (4) Institutionalization in the network is not running optimally. (5) interaction patterns or rules of the game in the network are consultative. (6) The distribution of power is still centralized because there are no clear rules regarding the distribution that must be carried out by related actors. (7) The strategies carried out by actors are optimal.*

**Keywords:** *Policy Network, Ecotourism Development, Actors, Rammang-Rammang.*

## DAFTAR ISI

Nomor Urut	Halaman
<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Teori.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>16</b>
2.1 Pendekatan Penelitian.....	16
2.2 Desain Penelitian.....	16
2.3 Prosedur Penelitian.....	16
2.3.1 Informan Penelitian.....	16
2.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	17
2.3.3 Teknik Analisis Data.....	18
2.4 Validitas dan Reliabilitas Data.....	19
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
3.1 Aktor ( <i>Actors</i> ).....	20
3.2 Fungsi ( <i>Function</i> ).....	26
3.3 Struktur ( <i>Structure</i> ).....	39
3.4 Pelembagaan ( <i>Institutionalization</i> ).....	45
3.5 Aturan Bertindak ( <i>Rule of Conduct</i> ).....	48
3.6 Hubungan Kekuasaan ( <i>Power Relations</i> ).....	54
3.7 Strategi Aktor ( <i>Actor Strategies</i> ).....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>

<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>58</b>
<b>4.2</b>	<b>Saran.....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>63</b>

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1	Jumlah Pengunjung Rammang-Rammang .....	8
Tabel 2. 1	Informan Penelitian .....	17
Tabel 3. 1	Aktor pada Implementasi Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros.....	23
Tabel 3. 2	Fungsi Jaringan Pada Aktor Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Ecotourism di Rammang-Rammang.....	32
Tabel 3. 3	Struktur Jaringan Pada Aktor Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Ecotourism di Rammang-Rammang.....	43
Tabel 3. 4	Pelembagaan Jaringan Pada Aktor Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Ecotourism di Rammang-Rammang .....	47

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir .....	13
Gambar 3. 1 Data Pengunjung dan Retribusi Ekowisata Rammang-Rammang ....	35
Gambar 3. 2 Data Retribusi Ekowisata Rammang-Rammang.....	35

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Transformasi pada perspektif administrasi publik memberikan banyak jawaban atas persoalan yang semakin kompleks pada problematika publik. Tata kelola negara yang efektif menjadi salah satu kunci penyelesaian perkembangan masalah-masalah tersebut dimana implementasinya tidak hanya menjadikan pemerintah sebagai aktor utama melainkan mengutamakan jaringan bersama pada kesuksesan visi publik yang dirumuskan secara kolektif. Perspektif seperti ini menghendaki pemerintah bukan lagi sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan publik (Alwi, 2018).

Pada praktiknya, kebijakan pemerintah harus memastikan terkait kerjasama dari berbagai kalangan dan aktor untuk dilibatkan pada implementasi kebijakan yang telah dirumuskan tersebut. Sederhananya, diharapkan pemerintah bisa membentuk jaringan kolaborasi dengan para aktor dalam keberhasilan visi dari sebuah kebijakan. Pada aksi solutif dari seluruh problematika yang sangat rumit karena unsur politis yang sarat keperluannya masing-masing di pandangan kebijakan publik, perspektif administrasi publik sendiri mengenal aksi solutif tersebut dengan sebutan jaringan kebijakan (Sopia Rukmana et al., 2020).

Pada perkembangannya, muncul berbagai gerakan perubahan yang didasari oleh semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi sehingga memicu transformasi pada perspektif tata kelola negara. Peristiwa pergantian paradigma ini dimulai dengan perumusan serta penerapan pada metode yang digunakan khususnya pada konsep *government ke governance*. Paradigma *governance* sendiri tidak serta merta hadir untuk mengatur tata kelola pemerintahan khususnya pada kewenangan dan kekuasaan tetapi relasi kerjasama dan keterlibatan pada aktor-aktor diluar lingkup pemerintah. Secara singkat, bagaimana pemerintah sukses menjadi wadah serta katalisator untuk mencipta kebijakan dan regulasi semacamnya (A. R. Hidayat et al., 2015).

Berbagai kajian yang dikembangkan dari perspektif *governance* memberikan solusi terhadap realitas implementasi kebijakan publik saat ini yang memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan dari berbagai organisasi publik dan swasta. Salah satu kajian tersebut adalah penelitian jaringan yang disebut dengan konsep jaringan kebijakan ketika mempertimbangkan fenomena publik, yang saat ini sedang dikembangkan untuk mencapai tujuan politik yang kompleks. Fenomena ini erat kaitannya dengan proses kebijakan pemerintah saat ini yang cenderung melibatkan banyak aktor, baik pemerintah maupun swasta. Alasan utamanya adalah bahwa isu-isu publik saat ini menjadi semakin kompleks dan merupakan hal yang mendesak dan penting untuk mengadaptasi pendekatan-pendekatan-pendekatan baru untuk menghadapi kompleksitas dan keragaman aktor yang terlibat dalam proses kebijakan tertentu (Kasmadsi & Alwi, 2015).

Dari sekian banyak tujuan kebijakan publik disebutkan bahwa kebijakan publik lahir untuk mengatasi masalah publik, yang mana masalah ini pada umumnya merupakan *wicked problem* sehingga memerlukan kolaborasi antar para pemangku kepentingan untuk mengatasinya. Mereka perlu terlibat secara kolektif dan serius untuk mendiskusikan ruang lingkup masalah serta alternatif solusinya (Alwi, 2018). Karena *wicked problem* merupakan problematika yang berada pada titik diferensial karena belum atau tidak terdefinisikan dengan jelas serta selalu diperdebatkan, penyelesaian masalah tidak cukup dengan melakukan penyelidikan dan eksperimen semata tapi harus dengan kolaborasi para aktor serta pemangku kepentingan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik pasti akan dihadapkan dengan berbagai problematika sehingga kinerja implementasi suatu kebijakan akan rumit diselesaikan. Ada masalah yang mungkin bisa diselesaikan dengan efektif dan ada juga masalah yang memerlukan proses analisis panjang serta diskusi yang alot untuk menemukan titik temu, namun tak cukup sampai disitu ternyata ada juga masalah yang sangat sulit ditemukan jalan keluarnya walaupun dengan menggunakan alat analisis yang canggih. Masalah tersebut dalam kebijakan publik disebut "*wicked problem*" (Alwi, 2022).

"*The existence of a discrepancy representing a wicked problem can be explained in numerous ways,*" atau penentuan masalah serta solusi yang ditawarkan tidak mencapai kesepakatan di antara pemangku kepentingan. Para aktor memiliki pandangan berbeda dalam menentukan hal maupun kepentingan yang dimiliki sehingga variasi dari metode dan cara menentukan masalah serta solusi sangat majemuk merupakan salah satu karakteristik *wicked problem* yang menjadi bahan perbincangan serius di ranah kebijakan publik khususnya pada hal-hal yang memiliki relasi kuasa pada kepentingan berbagai aktor (Alwi, 2022). Apalagi pada karakteristik ini jika ditemukan pada kondisi sosial-kultural yang saling resisten, akan sangat sulit dipecahkan bahkan perlu kiat luar biasa untuk mendudukan perkaranya.

Problematika tersebut secara kolektif menjadi sebuah komponen strategis dalam kajian governance jika dihubungkan pada bagaimana kondisi latar belakang yang terjadi di suatu tempat yang memiliki berbagai unsur-unsur politik ekonomi terkait capaian-capaian aktor, struktur hingga dinding yang saling membatasi satu sama lain. Secara komprehensif muncul sebuah pertanyaan, apakah sebuah kelompok masyarakat sebagai aktor kebijakan bisa menggantikan *positioning* pemerintah sebagai *stakeholder* kebijakan dalam mengelola suatu sumberdaya secara jangka panjang? Apakah latar belakang dari tempat tersebut mempengaruhi, baik secara historis maupun pranata yang berlaku? Bagaimana relasi kuasa antara satu aktor dan aktor lainnya dengan kepentingan yang mungkin saja berbeda? Ternyata dalam karakteristik relasi kuasa antar aktor tersebut didefinisikan secara tersirat untuk mengisyaratkan bahwa kompleksitas masalah pada jaringan para aktor tersebut karena hadirnya beberapa unsur berupa hadirnya ketimpangan antarpihak/*actor*, tidak bersifat biner sehingga condong ke multiaktor, sifatnya dinamis oleh aktor-aktor yang terlibat serta ada dominasi yang tak terduga (Sirimorok et al., 2023).

Jaringan kebijakan kemudian diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang kompleks. Jaringan kebijakan ini tidak cocok jika sekedar menjadikan khalayak sasaran sebagai objek kebijakan, namun perlu menjadikan khalayak sasaran sebagai subjek dari proses perumusan kebijakan. Teori jaringan dapat digunakan pada berbagai tingkat aktivitas, seperti perumusan dan implementasi kebijakan serta pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia secara umum (*resource sharing*). Berbagi sumber daya hanya mungkin dilakukan dalam organisasi berbasis jaringan. Sifat jaringan ini memungkinkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, misalnya dalam proses perumusan kebijakan (Dwiyanto, 2008)

(E.-H. Klijn et al., 2000) berpendapat bahwa pendekatan jaringan menyajikan kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi antara banyak pelaku organisasi yang tiap organisasi bergantung pada organisasi lain untuk sumber daya dalam bertahan dan mencapai tujuannya. Saat aktor berhubungan, proses perbandingan sumber daya muncul dan aturan berkembang yang mengatur jalinan interaksi sampai batas tertentu mengisolasi jaringan dari dunia luar. Ini memunculkan aksi-reaksi terhadap kepentingan para aktor yang terlibat pada sebuah perumusan kebijakan hingga sampai pada implementasinya. Dalam pandangan lain, (H. E. Klijn & Koppenjan, 2016) memaparkan bahwa sebuah kebijakan direpresentasikan pada perilaku aktor kebijakan, misalnya seorang tokoh, kelompok atau lembaga pemerintah dalam suatu aktivitas politik. Interaksi dalam proses pembuatan kebijakan seringkali menghadapi permasalahan kompleks karena dalam prosesnya dinamika yang berkembang sulit untuk diprediksi serta beragamnya perspektif para aktor yang ada dalam proses tersebut dalam lingkungan yang multi aktor dan multi sektor.

Di Indonesia, pergerakan paradigma ditandai dengan sistem desentralisasi semakin umum terlihat. Sistem desentralisasi atau dikenali sebagai sistem otonomi daerah yang memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintah daerah untuk menata dan merumuskan sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini semakin diperkuat dengan regulasi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi konsentrasi salah satunya adalah pengaturan di fokus pariwisata tentang pengembangan potensi desa wisata dan peningkatan ekonomi masyarakat. Perspektif jaringan kebijakan publik (*policy network*) menjadi pendekatan yang relatif baru dalam diskursus kebijakan publik jika dibandingkan dengan beberapa atau pendekatan yang umum digunakan dalam formulasi bahkan pada tahapan implementasi kebijakan. Perspektif jaringan sendiri hadir dan dikembangkan sebagai strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks (Moran et al., 2006)

Pada beberapa waktu terakhir, negara-negara yang notabene berkembang mulai menjalankan sebuah keputusan serta alternatif dalam mengimplementasikan desentralisasi pada pengelolaan sumberdaya alam (Larson & Soto, 2008). Salah satu bentuk implementasi desentralisasi tersebut di antaranya tergambarkan dalam keadaan masyarakat sebagai aktor inisiasi pada pengelolaan sumberdaya alam dan

secara kontemporer marak dirumuskan ke dalam regulasi dan perencanaan pembangunan utamanya pada desa dan upaya melestarikan alam (Saunders, 2014). Desentralisasi yang tercipta ini merupakan kiat membangun jaringan pengelolaan sumberdaya secara bersama-sama dengan seluruh aktor yang terlibat dengan tupoksinya masing-masing sehingga menciptakan perlindungan dari rusaknya sumberdaya yang dimanfaatkan. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kondisi iklim setempat (Diaz et al., 2022).

Ketika melihat bagaimana potensi negara dalam mendukung praktik sosial oleh sekelompok warga dalam memanfaatkan sumberdaya yang lebih adil dan berkelanjutan, tentu akan hadir pula ketimpangan yang terjadi karena relasi kuasa antarpihak dengan berbagai kepentingannya. Namun, yang menjadikannya sebagai kajian menarik adalah di tengah maraknya kegagalan terhadap implementasi dalam struktur jaringan kebijakan tersebut, ada sekelompok warga berhasil mendirikan sistem pengelolaan bersama walau di tengah latar yang kontradiktif dan hanya sebagian kecil kelompok dalam jangka panjang bisa melakukannya. Kondisi ini didorong karena didasari karena berbagai faktor namun biasanya mempunyai substansi yang sama pada kasus serupa di tempat yang berbeda. Perwujudan tersebut akhirnya melahirkan serangkaian aturan yang terbagi secara sosial melalui lisan dan biasanya tidak dituliskan yang dikomunikasikan serta dijalankan di luar ruang-ruang formal, ini kerap kali dikenali sebagai kesepakatan masyarakat secara informal atau pranata informal (Helmke & Levitsky, 2006)

Di kabupaten Maros tepatnya di desa Salenrang, untuk memperkuat klaim pada ruang Rammang-Rammang dan kawasan karst demi kelestariannya tetap terjaga khususnya dari perusakan akibat industri ekstraktif tambang, masyarakat kemudian mengkonsolidasikan hingga menginisiasi terciptanya sebuah regulasi dan konsep tanding terkait pemanfaatan sumberdaya yang lebih ramah lingkungan serta berhasil menciptakan alternatif ekonomi baru yang menggantikan aktivitas tambang. Adanya gerakan masyarakat yang masif sebagai aktor utama dalam menyusun konsep tanding guna melawan aktivitas ekstraktif tersebut kemudian melahirkan perhatian terhadap publik secara luas dengan pertanyaan yang amat mendasar, apakah konsep yang ditawarkan sebagai tandingan bisa di adaptasi dengan baik oleh masyarakat dengan 2 (dua) indikator utama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam atau justru sebaliknya. Diangkatnya sektor pariwisata sebagai konsep tanding bukan tanpa diskusi dan pertimbangan matang walaupun konsep antitesis industri ekstraktif ini bukan satu-satunya alternatif. Akhirnya demi terjalannya konsep tanding tersebut, pada tahun 2015 membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan mendorong lahirnya Peraturan Desa dan SK Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Maros terkait pengelolaan wisata di Rammang-Rammang dengan harapan bisa melenyapkan potensi lahirnya kembali izin tambang.

Setelah melalui dinamika yang panjang, disadari ternyata pada implementasinya peraturan desa terkait pengelolaan wisata saja tidak cukup untuk menjaga potensi tambang tidak kembali muncul pada ruang Rammang-rammang.

Keberadaan Perda yang khusus mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial seperti karst diperlukan demi mencegah problematika selain ketakutan atas tambang yaitu konflik benturan antara masyarakat ke masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Walaupun telah ada regulasi yang mengatur secara umum pada tingkat pusat, Muhammad Ikhwan atau Iwan Dento sapaan akrabnya berpendapat bahwa hadirnya Perda ini sangat penting bagi warga Salenrang yang bermukim di sekitar kawasan karst khususnya bagi keberlangsungan industri pariwisata yang menjadi sumber pencaharian mereka. Pada tahun 2019, setelah proses yang sangat panjang melalui berbagai pihak dan aktor, lahirlah Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep. Perda ini diharapkan dapat melindungi kawasan dari dampak eksploitasi berlebihan baik dari perusahaan ataupun masyarakat sendiri (Hajramurni et al., 2022). Jika ditinjau pada proses terciptanya kedua regulasi tersebut, adanya pelibatan aktor yang beragam karena sadar terhadap keterbatasan masing-masing baik secara sumberdaya maupun *power resources* lainnya menjadikan proses ini sangat kompleks. Jika ditinjau pada pengoptimalan terhadap konsep *ecotourism* sebagai implementasi dari regulasi yang telah dirumuskan sebelumnya, masyarakat di Rammang-rammang secara aplikatif menjalankan konsep tersebut dengan basis masyarakat sebagai aktor utama atau *Community Based Tourism*. Walau demikian, hadirnya konflik pada relasi kuasa atas hak pengelolaan terhadap sumberdaya yang sangat kaya di Rammang-rammang ini kemudian masih menjadi persoalan serius yang perlu dipecahkan masalahnya. Adanya fenomena disharmonis relasi antara pemerintah setempat dan masyarakat menjadi poin utama untuk diteliti secara lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Berdasarkan fenomena tersebut, teori jaringan kebijakan dianggap efektif untuk diaplikasikan dalam menjelaskan apa yang terjadi dalam pengoptimalan kebijakan *ecotourism* pada kawasan karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros.

Kawasan *ecotourism* Rammang-Rammang merupakan salah satu destinasi wisata yang paling dikenal di Sulawesi Selatan beberapa waktu terakhir yang berada dalam cakupan Desa Salenrang, Kabupaten Maros. Diferensiasi yang menjadikan Rammang-Rammang unik ketimbang destinasi wisata lainnya yang dibangun oleh pemerintah dan swasta adalah bagaimana inisiasi, jejak historis serta pengelolaan yang secara keseluruhan dimiliki oleh masyarakat setempat melalui Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata. Hal ini tercipta sebagai aktualisasi aksi resisten terhadap industri ekstraksi tambang di kawasan tersebut. Pada perkembangannya, pariwisata di kawasan Rammang-Rammang memberikan efek ekonomi yang sangat signifikan. Mata pencaharian masyarakat yang dulunya hanya bergantung pada hasil perkebunan, batu gamping maupun mengumpulkan kotoran kelelawar yang diolah sebagai pupuk, sekarang telah memiliki opsi baru pada ekosistem pariwisata berupa jasa perahu, penginapan, restoran dan café serta lahan yang dijadikan sebagai tempat parkir. Alhasil, setidaknya ada 282 keluarga dari 500 keluarga di desa Salenrang yang terbantu secara ekonomi sejak konsep *ecotourism* ini hadir (Rahman, 2022).

*Ecotourism* sendiri secara definisi menurut (Satria, 2009) merupakan suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Pada konsep *ecotourism* ada beberapa fungsi yang menjadi titik berat pada pelaksanaannya yaitu keberlangsungan alam atau aspek ekologi, peningkatan kapasitas ekonomi Masyarakat dan psikologi adaptif pada kehidupan sosial budaya Masyarakat. Sementara, jika ditinjau pada aspek lainnya khususnya pada segi tata kelola, *ecotourism* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan pandangan kultural setempat.

Konsep *ecotourism* memiliki peran yang penting melihat Indonesia dengan potensi keindahan alam dan kekayaan budaya yang sangat beragam serta bernilai tinggi dalam industri pariwisata. Potensi alam ini berupa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, keanekaragaman flora, fauna dan fenomena alam dengan keindahan lanskap yang masih terjaga kelestariannya. Urgensi pada konsep *ecotourism* dalam pengembangan potensi lokal wilayah pariwisata menjadi sangat penting dikarenakan mampu meningkatkan nilai jual pada berbagai sektor khususnya pada ekonomi rakyat dan pelestarian lingkungan yang rentan untuk rusak apabila tidak dilindungi. Hal ini juga memiliki urgensi yang besar khususnya pada potensi karst (Dewi et al., 2021).

Indonesia sendiri memiliki potensi bentang alam karst seluas 154.000 km<sup>2</sup> atau 0,08% dari luas keseluruhan daratan Indonesia. Sulawesi Selatan sangat beruntung karena memiliki kawasan karst yang tersebar pada kabupatennya. Salah satu yang paling terkenal dan diakui oleh dunia adalah kawasan karst Maros-Pangkep (KKMP) yang merupakan kawasan karst terbesar dan terindah kedua di dunia setelah kawasan karst di China Selatan. Kawasan Desa Wisata Rammang-Rammang yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi salah satu destinasi pariwisata karst yang marak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara (Ikhsan, 2021)

Dengan berbagai faktor tersebut, pengembangan pariwisata pada Kawasan Rammang-rammang bukanlah sesuatu hal yang baru, berbagai usaha peningkatan baik sarana maupun prasarana pariwisata terus dilangsungkan. (Nugroho & Yusuf, 2013), menjabarkan bahwa di era globalisasi ini, sektor pariwisata mulai beralih pada konservasi dan upaya pelestarian lingkungan yang dikenal dengan konsep *ecotourism*. *Ecotourism* menjadi salah satu alternatif pengembangan potensi lokal yang diharapkan memberikan dampak yang lebih komprehensif serta meningkatkan pembangunan yang bersifat berkelanjutan pada dua objek utama yaitu masyarakat lokal/*local communities dan lingkungan (environment)*.

Konsep *ecotourism* sendiri lahir sebagai bentuk kontribusi dalam aksi pelestarian lingkungan yang dinilai sangat tinggi. Sederhananya, konsep *ecotourism* banyak diadopsi oleh negara dengan perspektif melestarikan sumber daya alam

melalui segala cara yang dapat dilakukan. *Ecotourism* dapat menstimulasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui ekonomi kerakyatan serta menjaga lingkungan alam serta warisan budaya dengan menciptakan kesadaran bagi seluruh pihak yang terlibat didalamnya (Wuleka Kuuder & Kuuder, 2012).

Pada kawasan karst Rammang-Rammang tepatnya di Desa Salenrang yang menjadi pusat kegiatan *ecotourism* sendiri dimulai pada tahun 2015 oleh warga setempat, Muhammad Ikhwan atau akrab disapa *Iwan Dento* bersama dengan rekan-rekannya membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Selama 2 (dua) tahun setelah pembentukan Pokdarwis walaupun tidak memiliki waktu yang banyak untuk melihat referensi dan percontohan pengelolaan, akhirnya pelan tapi pasti titik terang dari pengelolaan objek wisata karst Rammang-Rammang mulai terlihat. Bersama Pokdarwis dan masyarakat akhirnya menyepakati pengelolaan pariwisata berbasis *ecotourism* yang mengedepankan konservasi dan pemberdayaan masyarakat baik dalam menjaga lingkungan maupun dalam peningkatan ekonomi.

Selain peningkatan ekonomi, *ecotourism* menutup celah peluang industri ekstraktif pada kawasan karst, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian kawasan wisata menjadi urgensi utama pada pelaksanaan konsep *ecotourism* yang dilakukan di Rammang-Rammang. Nilai *ecotourism* yang dihitung berdasarkan kesediaan pengunjung untuk membayar pada barang dan jasa di Rammang-Rammang sebesar Rp. 70.473.674.052,12,- atau US\$.5.427.314,14 per tahun dengan nilai surplus konsumen sebesar Rp. 19.046.303.438. Surplus konsumen ini menunjukkan bahwa aktivitas wisata dengan pemberlakuan konsep *ecotourism* karena terjadi atraksi ataupun suguhan yang unik di pariwisata tersebut. Dengan angka yang sangat fantastis ini, masyarakat mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sebagai *local communities* dan aktor utama pada pengelolaan wisata (Made et al., 2017).

Walau demikian, meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena pengunjung Rammang-Rammang yang kian bertambah dengan daya beli signifikan pada barang dan jasa yang ditawarkan pengelola, ancaman kerusakan atau penurunan kualitas objek wisata juga menjadi indikator yang tak kalah pentingnya dalam pelestarian kawasan wisata tersebut. Perlunya edukasi kepada seluruh aktor baik pengelola, pengunjung dan pemerintah tentang pentingnya menjaga kawasan tersebut dari kerusakan ekosistem melalui regulasi serta sistem kelola yang inklusif merupakan tanggung jawab bersama. Adanya Kelompok Sadar Wisata Desa Salenrang dan pranata lokal yang berlaku di masyarakat khususnya dalam menjaga aliran sungai serta lingkungan di sekitar lokasi wisata menjadi unsur penting pada pelestarian dan terjaganya kawasan Karst Rammang-Rammang (Putra et al., 2023).

Dalam peningkatan potensi *ecotourism*, seyogyanya pemerintah serta *stakeholder* lainnya turut andil dalam memperhatikan sarana dan prasarana serta infrastruktur guna meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung sehingga mampu mempercepat kebangkitan pariwisata serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Secara khusus berikut merupakan jumlah pengunjung selama periode 5 tahun pada kawasan wisata karst Rammang-rammang di Desa Salenrang, Kabupaten Maros.

**Tabel 1. 1 Jumlah Pengunjung Rammang-Rammang**

Tahun	Jumlah Pengunjung
2018	72.308
2019	50.690
2020	23.215
2021	31.221
2022	52.570

*Sumber:* (Badan Pusat Statistik Kab. Maros, 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat ditinjau bahwa jumlah pengunjung begitu fluktuatif serta mengalami penurunan pada masa pandemi per-tahun 2020, namun mengalami peningkatan jumlah pengunjung seiring lepasnya status Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Jumlah pengunjung sangat tidak menentu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor meliputi faktor cuaca, hal tersebut dikarenakan akses menuju kawasan karst tersebut harus ditempuh melalui perjalanan penyebrangan perahu, sehingga terdapat berbagai kendala yang dihadapi meliputi penurunan debit air sungai saat musim kemarau serta peluapan debit air ketika musim hujan. Hal tersebut menjadi sebuah hal yang patut ditinjau, melihat peran pemerintah masih begitu minim dalam memenuhi standar serta kualitas penyediaan fasilitas pada kawasan wisata Rammang-rammang. Selain itu, adanya perbedaan konsep pada tataran aktor pada perumusan dan implementasi kebijakan pada Kawasan Karst Rammang-Rammang menjadi penyebab potensi penyalahgunaan wewenang serta kewajiban para aktor untuk menjaga kelestarian alam dan sejalan pada pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Studi tentang jaringan kebijakan yang dilakukan (R. A. Hidayat et al., 2015), dengan judul “Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba)” mengungkapkan bahwa perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa Kajang di kabupaten Bulukumba tidak menunjukkan proses pemberdayaan dimana dalam konsep pemberdayaan target kelompok kebijakan bukan hanya dipandang sebagai objek dari kebijakan yang dirumuskan, melainkan lebih kepada subjek atau pelaku yang juga berperan secara aktif dalam perumusan kebijakan.

Selanjutnya, penelitian (Hartina et al., 2020), dengan judul “*Trust in the Network of Food Diversification Policy Implementation in Bone Regency*” mengungkapkan bahwa interaksi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Bone belum menunjukkan adanya *trust*. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kepercayaan terhadap niat baik yang ditunjukkan dengan adanya kesediaan untuk menghadiri pertemuan antara KWT dan penyuluh

dalam hal pendampingan. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan program bersama untuk meningkatkan kinerja kebijakan, kepercayaan terhadap kesepakatan kontrak tidak terwujud karena tidak ada aturan main yang disepakati bersama dalam implementasi kebijakan oleh para aktor dan yang terakhir tidak ada peluang yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas kesepakatan bersama diantara para aktor sehingga sukar teridentifikasi perilaku menyimpang dari para aktor yang terlibat dalam kebijakan ini.

(Alwi & Kasmad, 2014), dalam penelitiannya "*Bureaucratic System Vs People Empowerment Policy: Empirical Evidence From Cocoa Farmer Empowerment Policy In South Sulawesi Province, Indonesia*" mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan petani kakao di provinsi Sulawesi Selatan masih menggunakan mekanisme birokrasi yang cenderung kaku dan *rule oriented* sehingga program kebijakannya masih tergolong proyek birokrasi dan bukan berorientasi pemberdayaan murni.

Dari segi empirik, penelitian ini penting untuk memberi gambaran secara terukur pada konteks multiaktor di kawasan karst Rammang-Rammang khususnya dalam mengoptimalkan konsep *ecotourism* dalam mencapai 2 (dua) indikator utama yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan terjaganya ekosistem lingkungan (ekologis) pada kawasan tersebut. Munculnya berbagai problematika sosial dan konflik relasi kuasa erat kaitannya dengan lemahnya *stakeholder* utama yaitu pemerintah dan kelompok masyarakat dalam memahami serta mempertemukan hak dan kewajiban yang telah disepakati serta dilimpahkan kepada masing-masing aktor. Berbagai masalah yang timbul ini memberikan hipotesis bahwa ada konflik kepentingan khususnya yang dibawa oleh pemerintah setempat untuk pribadi dan komunitas tertentu sementara pengetahuan masyarakat dalam mengetahui hak-haknya sebagai warga negara meningkat.

Diferensiasi tersebut menjadi acuan penulis untuk merumuskan formulasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul selama penelitian berlangsung.

## 1.2 Landasan Teori

Studi kebijakan beberapa waktu terakhir menjadi konsep yang marak diperbincangkan berbagai pihak mulai dari aparat, lembaga negara, swasta hingga masyarakat umum. Dalam kajian politik, jaringan kerap dikonotasikan oleh pegiat politik maupun peneliti dalam memaparkan urgensi terhadap presensi pemangku kepentingan dari latar belakang masing-masing untuk mendiskusikan serta mengambil keputusan sehingga melahirkan kebijakan publik. Teori jaringan merupakan salah satu perspektif administrasi publik yang memberi konsentrasi terhadap perhatian kepada struktur terkecil hingga terbesar. Perspektif ini menjelaskan bahwa dalam teori jaringan, aktor dapat diidentifikasi sebagai sebuah individu, kelompok, korporasi dan masyarakat. Adanya konektivitas bisa pada semua tingkatan baik di tingkatan struktur sosial secara makro maupun mikro. Pada teori jaringan sendiri, karakteristik kunci pada studinya adalah bagaimana proses analisa

yang dijalankan diupayakan terarah pada pengetahuan terhadap relasi di kalangan dan antar aktor yang tidak terikat secara yuridis serta tak melengkapi persyaratan pemenuhan dalam kelompok (Wellman, 1985 dalam Ritzer, 2004)

Pada dasarnya terdapat berbagai teori dalam jaringan kebijakan. Misalnya teori jaringan kebijakan yang dikemukakan oleh (Deleon & Varda, 2009) yang membagi ke dalam tujuh dimensi yaitu Representasi/Keanekaragaman, *Reciprocity*/hubungan timbal balik, *Horizontal Power Structure*/Kekuatan Struktur Horizontal, *Embeddedness*/Keterikatan, *Trust and Formality*/Kepercayaan dan Formalitas, *Participatory Decision Making*/Pengambilan Keputusan Partisipatif, *Collaborative Leadership*/Kepemimpinan Kolaboratif. Selain itu, teori jaringan implementasi juga dikemukakan oleh (DeSeve, 2007) yang berfokus mengenai manajemen keberhasilan dalam kolaborasi yang terdiri dari struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan antar partisipan, akses terhadap kekuasaan.

Dalam studi jaringan kebijakan, (Van Waarden, 1992) menformulasikan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan menyebutkan dimensi penting pada jaringan kebijakan. Selain pada proses perumusan kebijakan, pandangan tersebut digunakan pada implementasi kebijakan. Jika ditinjau pada penggunaannya, teori ini dapat menggambarkan bagaimana fenomena-fenomena yang kompleks dalam proses perumusan kebijakan hingga implementasi kebijakan yang telah dirumuskan sehingga menjadi acuan bagi organisasi berbasis jaringan dalam rangka merumuskan sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi utama jaringan kebijakan yaitu: (1) *actors* (aktor), (2) *function* (fungsi), (3) *structure* (struktur), (4) *institutionalization* (pelembagaan), (5) *rules of conduct* (aturan bertindak), (6) *power relations* (hubungan kekuasaan), dan (7) *actor strategies* (pihak strategis). Untuk mendalami konsep jaringan kebijakan, berikut penjelasan masing-masing dimensi jaringan kebijakan oleh Waarden :

#### 1. *Actors* (aktor)

Aktor merupakan jumlah partisipan dalam pengambilan keputusan. Jumlah partisipan akan menentukan ukuran jaringan. Semakin banyak aktor yang terlibat, maka semakin besar pula jaringan tersebut, demikian sebaliknya. Pelaku dalam jaringan dapat berupa individu maupun organisasi. Karakteristik jaringan sangat dipengaruhi oleh jenis aktor yang terlibat. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dan kepentingan aktor menjadi dasar saling ketergantungan. Adapun properti aktor yang relevan adalah struktur, kapasitas, sumber daya dan kinerja organisasi pemerintah dan masyarakat, tingkat profesionalisasi yaitu pola pelatihan dan rekrutmen perwakilan organisasi seperti negara dan mandat mereka, konsepsi peran dan sikap.

#### 2. *Function* (fungsi)

Jaringan sebagai saluran komunikasi dapat melakukan berbagai fungsi sendiri atau secara bersamaan. Fungsi ini bergantung pada kebutuhan, niat, sumber daya dan strategi para aktor yang terlibat. Sebagaimana diketahui

bahwa struktur jaringan tidak memiliki tujuannya sendiri. Konsep fungsi dalam hal ini menjadi jembatan antara 'struktur' dan 'aktor' dalam jaringan. Fungsi utama jaringan kebijakan adalah untuk meningkatkan intensitas hubungan para anggota jaringan, yaitu:

- a. Saluran akses terhadap proses pengambilan keputusan
- b. Konsultasi, atau pertukaran informasi
- c. Negosiasi, yaitu pertukaran sumber daya dan/atau kinerja atau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, mobilisasi sumber daya
- d. Koordinasi tindakan independen
- e. Kerjasama dalam formulasi, implementasi, dan legitimasi kebijakan

### 3. *Structure* (struktur)

Struktur jaringan kebijakan mengacu pada pola hubungan antar aktor. Beberapa variabel penting dalam struktur ini adalah:

- a. Ukuran/besaran jaringan ditentukan oleh jumlah aktor
- b. Batas-batas yang mungkin terbuka dan lancar, atau tertutup dan monopolistik
- c. Jenis keanggotaan: partisipasi sukarela atau wajib. Hal ini menentukan apakah para pelaku memandang jaringan sebagai sebuah masalah atau peluang
- d. Pola hubungan: kacau atau teratur
- e. Intensitas atau kekuatan hubungan, yaitu frekuensi dan durasi interaksi
- f. Kepadatan dan multipleksitas yakni sejauh mana para aktor dihubungkan oleh banyak relasi
- g. Simetri atau timbal balik dari interkoneksi
- h. Pengelompokan atau diferensiasi dalam subjaringan
- i. Pola atau jenis koordinasi yang menghubungkan: wewenang hierarkis, konsultasi dan tawar-menawar horizontal, keanggotaan yang tumpang tindih, kepemimpinan yang saling terkait, mobilitas personel yang sering dari satu organisasi ke organisasi lainnya
- j. Sentralitas: tidak ada plurisentris (komunitas bersama), atau unit pusat yaitu organisasi utama sebagai pemerakarsa kebijakan
- k. Tingkat pendelegasian kompetensi pengambilan keputusan ke unit pusat dan pengendalian oleh peserta jaringan
- l. Sifat hubungan: konflikual, kompetitif atau kooperatif
- m. Stabilitas

### 4. *Institutionalization* (Pelembagaan)

Institusionalisasi mengacu pada karakter struktur jaringan formal dan stabilitasnya. Ini berarti bahwa tingkat pelembagaan akan bergantung pada karakteristik struktural jaringan. Pelembagaan akan cenderung lebih besar dalam jaringan tertutup dengan keanggotaan wajib, hubungan yang teratur, intensitas tinggi, multipleksitas dan simetri hubungan, keanggotaan yang

tumpeng tindih dan kepemimpinan yang saling terkait, dan dengan unit kebijakan pusat.

5. *Rule of Conduct* (Aturan bertindak)

Aturan perilaku disebut juga konvensi interaksi/aturan main merupakan salah satu dimensi jaringan kebijakan yang mengatur pertukaran dalam jaringan. Hal ini berasal dari persepsi peran, sikap, minat, latar belakang sosial dan pendidikan intelektual para aktor yang berpartisipasi dan kemungkinan besar pada gilirannya akan mempengaruhi hal-hal tersebut. Jaringan yang sangat terinstitusionalisasi juga dapat mengembangkan 'budaya' dan konvensi mereka sendiri seperti halnya yang dilakukan organisasi.

6. *Power relations* (Hubungan kekuasaan)

Hubungan kekuasaan merupakan salah satu karakteristik utama jaringan kebijakan. Hal ini ditandai dengan adanya distribusi kekuasaan yang mana merupakan fungsi dari distribusi sumber daya dan kebutuhan di antara para aktor dan struktur organisasi bersama mereka ketika mereka membentuk organisasi.

7. *Actor strategies* (Strategi aktor)

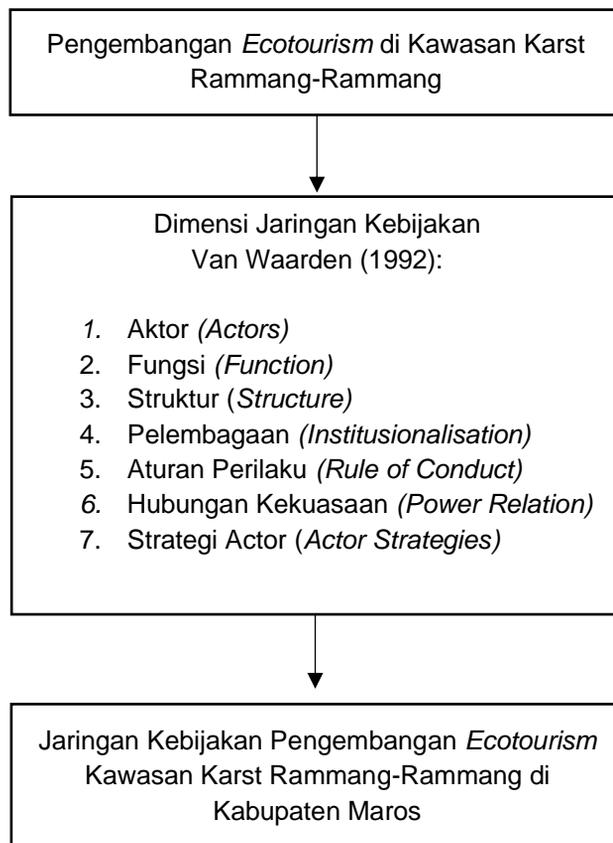
Strategi aktor berkaitan dengan bagaimana para aktor menciptakan dan/atau menggunakan jaringan dalam rangka memenuhi kebutuhan, kepentingan dan tujuan mereka, dan mengembangkan strategi untuk mengelola saling ketergantungan mereka.

Peneliti menggunakan teori ini karena dianggap relevan untuk bisa menganalisis secara menyeluruh terkait permasalahan yang ada pada jaringan kebijakan publik di kawasan karst Rammang-Rammang dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks atau '*wicked problem*' dengan dasar yang dikemukakan oleh (Alwi, 2022) dalam bukunya "*The existence of a discrepancy representing a wicked problem can be explained in numerous ways,*" atau penentuan masalah serta solusi yang ditawarkan tidak mencapai kesepakatan di antara pemangku kepentingan. Pada pengembangan konsep *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang teridentifikasi bahwa ada relasi kuasa yang memiliki kepentingan masing-masing namun penawaran pada tiap kalangan dalam penerapannya tidak didapatkan kesepakatan secara bersama sehingga penggunaan perspektif jaringan kebijakan dalam program pengembangan *ecotourism* di Kawasan Karst Rammang-Rammang menjadi sebuah strategi yang baik dilakukan untuk mengimplementasikan produk kebijakan publik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Jaringan yang dibentuk dan diimplementasi tentunya akan menghadirkan berbagai relasi antar aktor yang terkait dengan *ecotourism*, baik aktor pemerintahan maupun aktor non pemerintahan.

Konsep jaringan kebijakan juga fokus pada pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan publik dengan melibatkan banyak aktor seperti lembaga publik, legislatif, dan organisasi swasta (termasuk kelompok kepentingan, perusahaan,

organisasi nirlaba, dll) (Burt, 211 dalam Alwi, 2022). Peneliti menggunakan teori jaringan kebijakan yang dikemukakan oleh Van Waarden karena dianggap relevan untuk menganalisis jaringan kebijakan pada program pengembangan *ecotourism* di Kawasan Karst Rammang-Rammang. Teori ini memusatkan lebih dalam pada jaringan kebijakan dalam menganalisis peran dari aktor-aktor yang terlibat. Teori jaringan kebijakan yang dipaparkan oleh (Van Waarden, 1992) yang akan menjelaskan dan memberi batasan bagaimana seharusnya para stakeholder bersikap, serta melihat lebih mendalam bagaimana para aktor menjalankan peran mereka masing-masing di dalam jaringan kebijakan untuk mencapai visi dari sebuah kebijakan.

**Gambar 1. 1 Kerangka Pikir**



### 1.3 Rumusan Masalah

Implementasi kebijakan Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep khususnya di kawasan karst Rammang-Rammang dalam penerapan serta pengembangan konsep *ecotourism* dalam perspektif kebijakan publik dapat dilihat sebagai proses interaksi berbagai kelompok kepentingan yang melibatkan sejumlah aktor dan dipengaruhi oleh kepentingan yang melekat pada kelompok ataupun aktor tersebut. Proses lahirnya agenda kebijakan publik ini merupakan suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan para aktor (*stakeholders*).

(Jones 1994 dalam Jun, 2006), menjelaskan tentang proses kebijakan sebagai sebuah rangkaian tindakan yang secara definitif berkaitan dengan tujuan. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses kebijakan difokuskan pada proses-proses kelompok. Pendekatan seperti ini selain mempelajari peranan kelompok kepentingan juga menyidiki kelompok dalam lembaga-lembaga politik.

Pembentukan suatu kebijakan *ecotourism* pada kawasan esensial karst Maros-Pangkep selayaknya mempertimbangkan berbagai kriteria. Dalam mengimplementasikan kebijakan yang bersifat kompleks, terdapat beberapa unsur utama yang harus diperhatikan salah satunya adalah dengan menggunakan wadah jaringan sebagai tempat berlangsungnya perumusan kebijakan hingga implementasinya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Dinamika terhadap perspektif Jaringan Kebijakan pada Program Pengembangan Ecotourism di Kawasan Karst Rammang-Rammang?” yang penelitian ini difokuskan pada skala desa dengan jbaran pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimana proses implementasi kebijakan dalam mengoptimalkan konsep *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang khususnya di Desa Salenrang ditinjau dari dimensi-dimensi jaringan kebijakan (*policy network*) yaitu *actors, functions, structure, institutionalization, rules of conduct, power relations* dan *actor strategies*.”

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat kita uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dimensi jaringan kebijakan yang ada pada proses implementasi kebijakan *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang, Desa Salenrang Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui tipe jaringan kebijakan apa yang ada pada proses implementasi kebijakan *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang, Desa Salenrang Kabupaten Maros

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan sejumlah sasaran spesifik atas tujuan yang hendak dicapai tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat, meliputi:

## 1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mencari tahu dan menjelaskan fenomena kebijakan melalui pendekatan jaringan kebijakan yang saat ini masih sangat kurang di Indonesia. Jaringan kebijakan dalam konteks formulasi kebijakan ini menggunakan dimensi-dimensi utama *policy network* yang dikembangkan oleh (Van Waarden, 1992) untuk mengidentifikasi tipe jaringan kebijakan yang ada. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pembandingan dengan penelitian lain yang sejenis atau yang akan diteliti dan menjadi acuan untuk penelitian di masa mendatang, terkhusus yang menyangkut implementasi kebijakan yang menyangkut konsep tatakelola sumberdaya esensial secara ekonomi dan ekologi.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara *downward* kepada masyarakat Rammang-Rammang dalam melihat serta mengatasi dinamika sosial yang terjadi melalui forum-forum komunikasi dan kesepemahaman antar aktor sehingga *conflict of interest* dan relasi kuasa tidak mengganggu proses pengembangan *ecotourism* yang menjadi konsep tanding untuk pelestarian alam.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. (Creswell & David Creswell, 2018) mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok. Lebih lanjut (Creswell & David Creswell, 2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian fenomenologis, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus.

### **2.2 Desain Penelitian**

Cresswell (2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian fenomenologis, *grounded theory*, etnografi dan studi kasus.

Strategi ini menekankan pada desain penyelidikan yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus yang seringkali berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, dari satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi terperinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Artinya, data yang diperoleh akan dilaporkan dalam bentuk kalimat (narasi) atau gambar, bukan dalam bentuk angka. Oleh karena itu peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Hal ini karena studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh banyak informasi dengan lebih terperinci. Selain itu, peneliti dapat menyelidiki secara intensif fenomena sebagai fokus penelitian.

### **2.3 Prosedur Penelitian**

#### **2.3.1 Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi dan data terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Informan didasarkan atas relevansi, kredibilitas dan kapasitasnya dalam memberikan informasi terkait. Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Informan Penelitian**

No.	Informan	Jabatan
1.	Pemerintah Desa Salenrang, Kabupaten Maros	Penanggung Jawab Ekowisata Rammang-Rammang, BUMDES Appakabaji
2.	Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata Kab. Maros	Kepala Bidang Pariwisata Kab. Maros
3.	DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Wakil Ketua Pansus Raperda No 3 Tahun 2019, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2019
4.	Badan Pengelola Geopark Maros- Pangkep	Sekretaris BP Geopark Maros- Pangkep
5.	Komunitas Masyarakat Lokal / <i>Local Communities, Local Champion</i>	Komunitas Anak Sungai
6.	Media	Jurnalis Mongabay.id
7.	POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang	Sekretaris POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang
8.	Akademisi ( <i>Expert</i> )	Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

### 2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dari pertanyaan yang timbul pada penelitian di atas, dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan perihal tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan (*observation*), wawancara (*deep interview*), dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dimensi jaringan kebijakan dalam pada proses implementasi kebijakan *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang, maka penelitian ini ditempuh dengan menggunakan wawancara mendalam. Sebelum melakukan teknik wawancara mendalam kepada informan, observasi awal dilakukan dalam melihat dan mengamati secara langsung bagaimana dinamika yang terjadi pada lokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti kerap mendatangi kawasan karst Rammang-Rammang dan berbincang langsung dengan masyarakat setempat serta figur yang di tokohkan, untuk mengamati secara langsung apa yang sebenarnya terjadi pada penerapan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Wawancara mendalam

dilakukan pada seluruh aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan konsep *ecotourism* di Rammang-Rammang. Selain itu, dibutuhkan pula data sekunder seperti berbagai dokumen berkaitan dengan regulasi yang mengatur implementasi dari keputusan-keputusan yang hadir sebelumnya baik secara tertulis dan tidak tertulis serta dalam ranah pranata formal maupun informal yang dijalankan oleh masyarakat sebagai aktor utama.

### 2.3.3 Teknik Analisis Data

(Creswell & David Creswell, 2018) menjelaskan bahwa analisis data bertujuan untuk memahami data teks dan gambar sehingga dalam prosesnya melibatkan segmentasi dan pemisah data kemudian menyatukannya kembali. Lebih lanjut, (Creswell & David Creswell, 2018) memaparkan beberapa tahapan dalam analisis data yaitu sebagai berikut.

1. Mengatur dan Mempersiapkan Data (*Organizing and Preparing Data*)  
Tahapan awal dalam analisis data yaitu mengatur dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Hal ini melibatkan transkripsi wawancara, pemindaian optic bahan, mengetik catatan lapangan, membuat katalog semua bahan visual. Selanjutnya menyortir dan mengatur data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca dan Memahami Data (*Reading Through All Data*)  
Langkah ini memberikan gambaran umum mengenai informasi dan merefleksikan makna secara keseluruhan. Hal ini seperti apa gagasan umum yang disampaikan informan, apa idenya, hingga apa kesan keseluruhan kedalaman, kredibilitas, dan penggunaan informasi.
3. Mengkodekan Data (*Coding the Data*)  
Tahapan ini merupakan proses pengorganisasian data dengan memberi tanda atau kode. Selanjutnya menulis catatan-catatan khusus mengenai data yang diperoleh. Semua data (kalimat atau gambar) yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori dan memberi nama atau label pada kategori tersebut. Pemberian nama atau label tersebut seringkali didasarkan pada bahasa asli atau ucapan sebenarnya dari informan.
4. Menghasilkan Tema/Deskripsi (*Interrelating Themes/Description*)  
Tahapan ini menggunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi latar atau orang serta kategori atau tema untuk dianalisis. Deskripsi melibatkan penyampaian informasi secara rinci tentang orang, tempat, atau peristiwa dalam suatu latar. Selain itu, penggunaan kode juga dilakukan untuk menghasilkan sejumlah kecil tema atau kategori. Tema-tema inilah yang akan muncul sebagai temuan utama dalam penelitian kualitatif.

## 2.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Gibbs dalam Creswell (2018) menjelaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif berarti peneliti memeriksa keakuratan temuan dengan menggunakan prosedur tertentu. Validitas merupakan kekuatan penelitian kualitatif yang didasarkan pada penentuan apakah temuannya akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca suatu laporan. Beberapa prosedur validitas, yaitu:

1. Melakukan pelacakan sumber data yang berbeda, yaitu dengan memeriksa bukti dari sumber tersebut kemudian menggunakannya untuk membangun justifikasi yang koheren terhadap tema.
2. Menggunakan pengecekan anggota, yang mana dilakukan untuk menentukan keakuratan temuan dengan mengembalikan laporan akhir atau deskripsi spesifik atau tema kepada peserta dan menentukan apakah peserta merasa bahwa temuan tersebut akurat. Prosedur ini membuka kemungkinan untuk melakukan wawancara lanjutan dengan informan penelitian dan memberikan kesempatan untuk mereka mengomentari temuan.
3. Menggunakan deskripsi yang kaya dan tebal untuk menyapaikan temuan.
4. Memperjelas bias yang dihadirkan peneliti ke dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menciptakan narasi yang terbuka dan jujur yang akan diterima dengan baik oleh pembaca.
5. Menyajikan informasi negatif atau tidak sesuai yang bertentangan dengan tema.
6. Menghabiskan waktu lama di lapangan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.
7. Menggunakan pembekalan rekan untuk meningkatkan keakuratan akun.
8. Menggunakan auditor eksternal untuk meninjau keseluruhan proyek.

Gibbs dalam Creswell (2018) juga menjelaskan bahwa reliabilitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan peneliti konsisten pada peneliti yang berbeda dan proyek yang berbeda. Berikut uraian prosedur reliabilitas kualitatif.

1. Memeriksa transkrip untuk memastikan bahwa transkrip tersebut tidak memiliki kesalahan nyata yang dibuat selama transkripsi.
2. Memastikan tidak terjadi penyimpangan definisi kode.
3. Untuk penelitian tim, lakukan proses koordinasi komunikasi antar pembuat kode melalui pertemuan rutin yang terdokumentasi dan dengan berbagai analisis.
4. Melakukan cross-check kode untuk membandingkan hasil yang diperoleh secara independen.